BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Jepang tengah melakukan perubahan kebijakan keamanan yang indikatornya dapat dilihat dalam pembentukan Departemen Pertahanan sebagai peningkatan status Badan Pertahanan Jepang (*Japan Defence Agency/JDA)* pada 9 Januari 2007, pembangunan proyek Pertahanan Peluru Kendali Balistik (*Ballistic Missile Defense/BMD*), dan pernyataan Jepang untuk berperan intensif dalam isu keamanan internasional. Sepanjang sejarah pasca-Perang Dunia II telah berkembang isu kebijakan pertahanan baik pada tingkat internal maupun eksternal Jepang, khususnya Amerika Serikat mengenai posisi dan peran Jepang dalam memelihara stabilitas keamanan regional dan global. Perubahan yang signifikan terlihat dalam pengumuman Pemerintah Jepang 9 Desember 2004 tentang *National Defense Program Guidelines* yang kemudian mulai berlaku pada tahun anggaran 2005.

Meskipun dalam perubahan kebijakan keamanan ini dapat terlihat adanya pembangunan kapabilitas militer, namun kecenderungan ini tidak dapat dikatakan sebagai langkah awal Jepang untuk memisahkan diri dari hubungan-nya dengan Amerika Serikat (AS), khususnya dalam Hubungan Aliansi Jepang-AS yang didasari Traktat Keamanan Bersama. Pembangunan kapabilitas dan peningkatan peran militer Jepang merupakan sebuah upaya Jepang untuk semakin intensif berhubungan dengan AS, karena dalam penerapannya, kapabilitas militer Jepang akan diupayakan untuk dapat berintegrasi dan berdaya gerak tinggi untuk

menunjang aktivitas pasukan AS. Pembangunan kapabilitas militer Jepang juga tidak bersifat kuantitas, tapi lebih mengarah pada pembangunan kualitas yang kemudian akan mempengaruhi efektivitas operasi-nya sehingga dapat dilihat sebagai indikator-indikator yang positif bagi hubungan aliansi pertahanan Jepang dengan Amerika Serikat.

Dalam perkembangannya, perubahan kebijakan keamanan nasional Jepang dalam NDPG 2005 terlihat mendukung intensifitas program-program kerjasama pertahanan-keamanan yang sebelumnya telah dilakukan dalam Aliansi Pertahanan Jepang-AS yang kemudian membuka kemungkinan perluasan pokok kerjasama seperti program pertahanan peluru kendali balistik (*Balistic Missile Defense*/BMD). Program pertahanan peluru kendali balistik kemudian memunculkan pengaruh signifikan pada pokok-pokok kebijakan dan aktivitas operasi pertahanan antar kedua negara yang berdampak pada terlaksananya pengaturan-pengaturan dan kerjasama seperti: pengurangan jumlah pasukan AS di wilayah Jepang dan relokasi letak pasukan AS di Jepang pada pokok kebijakan, serta pengembangan bersama sistem pertahanan antara Jepang dan AS dan *interoperability* pasukan kedua negara dalam hal tingkat koordinasi dan kekuatan pertahanan pada pokok aktivitas operasi pertahanan.

Hal tersebut menimbukan prospek kelanjutan interaksi Jepang – Amerika Serikat yang cenderung positif seperti kemungkinan berlanjutnya aktivitas koordinasi dan latihan bersama dalam aktivitas pertahanan peluru kendali balistik dan militer dan ekspansi dengan cara promosi bersama program pertahanan peluru kendali balistik kepada rekan regional lainnya di Asia Timur. Hal tersebut sesuai

dengan hipotesis peneliti bahwa: Perubahan kebijakan keamanan nasional Jepang dalam *National Defense Program Guidelines 2005* berpengaruh positif terhadap hubungan aliansi pertahanan Jepang –Amerika Serikat yang ditandai dengan munculnya potensi bertambahnya wilayah kerja baru bagi aliansi seperti kerjasama pertahanan peluru kendali balistik sehingga dapat memberikan prospek kelanjutan hubungan bagi aliansi Jepang – Amerika Serikat.

5.2. Saran

Dengan adanya tingkatan tinggi kecurigaan dan rasa takut negara tetangga, Jepang punya tugas besar dalam meningkatkan tingkat keyakinan dan mempebaiki hubungan dengan para tetangga Asia Timur-nya. Tugas yang paling penting bagi Jepang adalah mengatasi masa lalu militerisme Jepang dengan cara mempertinggi nilai akuntabilitas dari pembangunan kapabilitas militer Jepang untuk meyakinkan kalangan internasioinal khususnya negara-negara Asia Timur bahwa militerisme tidak akan mendominasi jalur politik Jepang. Dengan adanya komitmen pemerintah Jepang untuk semakin intensif berpartisipasi dalam tindakan pertahanan kolektif dan isu keamanan internasional mempertahankan perdamaian dan kestabilan dalam lingkungan internasional maka peneliti menyarankan untuk dilakukannya revisi Konstitusi Perdamaian dan menghapus larangan bagi pembentukan potensial perang serta penolakan terhadap hak pertahanan-diri kolektif agar peran Jepang dalam isu keamanan internasional tidak terus menuai pertentangan politik yang dapat menghambat efektivitas kinerja SDF.